

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BADAN
PUBLIK YANG TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI PUBLIK
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung



Oleh

**Muhammad Fenda Augustian
NIM. 401.1311.067
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2017**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Muhammad Fenda Augustian

N.I.M : 401.1311.067

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi

**“EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BADAN PUBLIK
YANG TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.”**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Penulis, 2017



Fenda Augustian

HALAMAN PERSETUJUAN

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BADAN PUBLIK YANG TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SKRIPSI

Oleh :

Muhammad Fenda Augustian
NIM : 401 1311 067
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama

(Dr.Dwi Haryadi, S.H., M.H)
NIP.198307172012121004

Pembimbing Pendamping

(Sigit Nugroho, S.H., M.H)
NIP.198402102012121005

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum

(Rio Armanda Agustian, S. H., M. H)

NP.60841029

HALAMAN PENGESAHAN

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BADAN PUBLIK YANG TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SKRIPSI

Oleh :

Muhammad Fenda Augustian
NIM : 401 1311 067
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji
Pada tanggal 03 Agustus 2017
Dan dinyatakan **LULUS**

Majelis Penguji

1. Ketua : A. Fauzi Amiruddin S.H., M.M
NP.105206003
2. Sekretaris : Yokotani, S.H., M.H
NP. 606206003
3. Anggota : Dr. Abdul Rasyid Saliman, S.H., M.M
NP.606317034
4. Anggota : Sigit Nugroho, S.H., M.H
NP.198402102012121005

anies

Yktvzam

bpr

S. H. Syamsul Hadi

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung


Al Huda
Syamsul Hadi, S.H., M.H.,
NP.606007014

Syamsul Hadi, S.H., M.H.,
NP.606007014
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO

Langan kecowa apabisu hasil yang diperoleh tidak seperti yang diharapkan. Percaya bahwa semuanya adalah kesuksesan, bukan kegagalan.

Mengapa saya punya banyak kesuksesan?

Karena saya tahu banyak usaha yang gagal.

(Thomas Alva Edison)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh cinta, pengorbanan dan cerita yang tak berujung kupersembahkan
karya kecilku ini teruntuk :

- ❖ Orang tua tercinta, khususnya Ibunda tercinta yang telah memberikan kasih sayang, dorongan moril maupun inmaterill, doa tulus yang tiada henti-hentinya dan segalanya yang tak mungkin dapat dibalas oleh penulis..yang selalu memberikan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini..yang selalu menjadi GURU terbaik dalam hidup penulis.. Terimakasih dalam keputus asaan penulis dengan musibah ini, Ibu tetap menjadi pendorong dan penyemangat yang tiada henti bagi penulis..semoga ada surga kelak menjadi balasan bagi kasih sayang, cinta dan pengorbanan ibu. Amien.
- ❖ Adik-Adik ku tersayang Siti Fenyta Dirayati (Penot) dan Muhammad Farizan Syakir (Fasyah/Ambol) yang sangat saya sayangi yang selalu memberikan keceriaan dalam segala hal dan kasih sayang serta perhatiannya.
- ❖ Untuk orang yang mendampingi ku saat ini, maupun di masa depan kelak yang telah ditulis dalam “Lauh Mahfuzh”.Insha Allah.
- ❖ Sahabat-sahabatku Gugun, Wahyu, Reza, Sunarya(moly),Irfan Setiawan(madam), ,Keluarga Besar Sanggar Kemuning Belinyu, dan Komunitas Tukang Photo (KTP) Belinyu.
- ❖ Untuk teman seperjuangan Junio Leonda, Belatana dan rekan-rekan se Almamater Universitas Bangka Belitung, terutama Fakultas Hukum, yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terima kasih telah memberikan school of life, semangat, dukungan, arahan.

Terima kasih semuanya yang telah banyak membantu, membimbing,
mendidik, memotivasi, mensupport dan mendoakan hingga skripsi ini selesai

ABSTRAK

Muhammad Fenda Augustian

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BADAN PUBLIK YANG TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Skripsi.Fakultas Hukum.2017

Kata Kunci: Efektivitas, Penegakan Hukum, Informasi Publik

Keberadaan Lembaga Komisi Informasi Daerah Kepulauan Bangka Belitung sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa informasi publik. Secara khusus, keterbukaan akses menuju informasi publik diperlukan oleh mereka yang berkecimpung dalam bidang lingkungan, gerakan antikorupsi, hak asasi manusia, dan pers yang sering mengalami kesulitan dalam mengakses berbagai informasi dari lembaga pemerintah, dengan dalih rahasia negara. Rumusan masalah yang muncul yaitu Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap badan publik yang tidak memberikan informasi publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Faktor-faktor yang menyebabkan badan publik tidak memberikan informasi publik,. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi lapangan yang meliputi wawancara ke narasumber yaitu Komisi Informasi Daerah Kepulauan Bangka Belitung, wawancara ke Badan Publik yang bersangkutan. Pembahasan mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap badan publik yang tidak memberikan informasi publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Faktor-faktor yang menyebabkan badan publik tidak memberikan informasi publik. Tahapan untuk mengajukan pidana terhadap Badan Publik harus melalui tahapan penyelesaian sengketa di tingkat Komisi Informasi Daerah, Pengadilan Tata Usaha Negara atau Peradilan Negeri, dan dilanjutkan sampai ke Mahkamah Agung, kemudian mengajukan ke pihak Kepolisian dengan menyertakan bekal putusan dari Komisi Informasi sampai tahap penyelesaian di Mahkamah Agung terhadap Badan Publik yang tetap tidak memberikan informasi. Badan Publik menganggap informasi yang di minta oleh pemohon merupakan informasi yang dikecualikan atau bersifat rahasia, permintaan informasi yang dipersulit dengan syarat prosedural yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan oleh Badan Publik, serta kurangnya pemahaman badan publik terhadap konsep Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan belum paham mengenai tata cara pemberian informasi publik kepada pemohon dengan baik dan benar.



ABSTRACT

Muhammad Fenda Augustian

THE EFFECTIVENESS OF LAW ENFORCEMENT AGAINST PUBLIC AGENCY THAT DOES NOT PROVIDE PUBLIC INFORMATION IN THE PROVINCE OF BANGKA BELITUNG ISLANDS

Minithesis, Faculty of Law 2017.

Key Words :*Effectiveness, Law Enforcement, Public Information*

The existence of the Regional Comission Information Institute of Bangka Belitung Islands as an institution that has the authority to settle disputes of Public Information. Specifically, for openness access to Public Information was needed by those engaged in environmental sector, anticorruption, Human Rights, and the Press who often face difficulties in accessing information from Government Agency, under the pretext of state secrets. The formulation of the problem has been appeared that is how the Effectiveness Of Law Enforcement Against Public Agency That Does Not Provide Public Information in the Province of Bangka Belitung Islands, factors that cause Public Agency not provide Public Information in this research, the method was used normative juridical research method. The type of data was using primary data and secondary data obtained through field study which includes interview to resource person that is the Regional Information Commission of Bangka Belitung Islands, and interview to the Public Agency as related. Discussion on the Effectiveness of Law Enforcement Against Public Agency that does not Provide Public Information in the Province of Bangka Belitung Islands, is factors that cause Public Agency does not provide Public Information. Phases to request a criminal act against the Public Agency must through the phase of dispute resolution at the level of the Regional Commission Information, the Civil Court of Justice or District Court, and next to the Supreme Court, then it will be submitted to the Police with including the provision of the Information Commission until the settlement phase in the Supreme Court against the Public Agency which still not provide information yet. The Public Agency assume about information requested by the applicant to be exempt or confidential information, requests for information complicated by procedural conditions that are inconsistent with the Standard Operating Procedures for Public Information Services established by the Public Agency, along the lack of Public Agency understanding of Law Concerning Freedom of Access to Public Information and have not understood about procedures for Public Information to the applicant as properly and correctly.

KATA PENGANTAR

Bismillahirohmannirohim penulis mengucapkan puji syukur kehadirat ALLAH Subhanawata'alla karena berkat limpahan rahmat, karunia, nikmat serta hidayahNnya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung. Adapun judul skripsi ini adalah “**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BADAN PUBLIK YANG TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**”.

Perkenankanlah, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian studi ini kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Muh Yusuf., Msi, selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Syamsul Hadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
3. Bapak Toni S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
4. Bapak Rio Armando Agustian, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
5. Bapak Wirazilmustaan, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
6. Bapak Reko Dwi Salfutra S.H , M.H., selaku Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

7. Bapak Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H., sebagai Pembimbing Utama yang telah memberikan motivasi dan revisi-revisi dalam setiap bimbingan.
8. Bapak Sigit Nugroho, S.H., M.H., sebagai Pembimbing Pendamping yang telah memberikan masukan dan revisi dalam setiap bimbingan.
9. Staf Dosen dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
10. Keluarga besar penulis, orang tua penulis saudara penulis, serta segenap kerabat yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
11. Kepada teman-teman seperjuangan di Universitas Bangka Belitung yang tak dapat disebutkan satu persatu, semoga ALLAH subhanawata'alla membalas jasa, amal serta budi baik dengan pahala yang berlipat ganda.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat dan sekaligus menyampaikan permintaan maaf yang tulus jika dalam penulisan ini terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan. Penulis juga menerima saran dan kritik yang bertujuan serta bersifat membangun untuk menyempurnakan penulisan skripsi.

Belinyu, Juli 2017

Muhammad Fenda Augustian

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metodologi Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK, BADAN PUBLIK, PENEGAKAN HUKUM DAN EFEKTIVITAS HUKUM	21
A. Tindak Pidana.....	21
1. Tindak Pidana	21
2. Keterbukaan Informasi Publik.....	31

3. Tindak Pidana Keterbukaan Informasi Publik	40
B. Badan Publik	44
1. Pengertian Badan Publik	44
2. Hak dan Kewajiban Badan Publik	46
C. Penegakan Hukum.....	47
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	47
2. Teori Penegakan Hukum	51
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	53
4. Fungsi Penegakan Hukum.....	54
D. Efektivitas Hukum.....	55
BAB III EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BADAN PUBLIK YANG TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	58
A. Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Badan Publik yang tidak Memberikan Informasi Publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	58
B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Badan Publik Tidak Memberikan Informasi	71
BAB IV PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	